

Politik Pemberdayaan Petani Lokal Dalam Pembangunan Kampung: Akses Sumber Daya Dan Peran Pemerintah Di Wasur, Merauke

Devota Mikan¹, Samel W Ririhena²

¹ First affiliation, Address, City and Postcode, Country

² Second affiliation, Address, City and Postcode, Country

Article History

Received: 5 -12 2025

Revision : 12 – 1 2026

Accepted : 19 - 1 2026

Published: 2 – 2 2026



Abstract

Penelitian ini menganalisis pemberdayaan petani lokal di Kampung Wasur, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan menempatkan pemberdayaan sebagai persoalan akses terhadap sumber daya, kapasitas, dan dukungan pemerintah dalam pembangunan kampung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Maret-Mei 2018 dengan melibatkan 14 informan yang terdiri atas kepala kampung, aparat kampung, tokoh pemuda, tokoh adat, dan sepuluh masyarakat petani lokal. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pembinaan pertanian telah dilakukan melalui kerja sama pemerintah kabupaten, petugas penyuluh, dan pemerintah kampung. Namun, pemberdayaan belum optimal karena akses petani terhadap peralatan kerja, modal usaha, bibit, pupuk, dan teknologi pertanian belum merata, sementara sebagian pengetahuan hasil pelatihan belum dimanfaatkan secara konsisten. Pada aspek penataan jenis usaha, belum ditemukan dukungan yang memadai untuk menata tempat penjualan dan barang dagangan hasil pertanian agar lebih menarik dan terhubung dengan pasar. Sebagian petani masih menjual hasil pertanian di depan rumah atau menggunakannya untuk konsumsi keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak cukup dibangun melalui transfer pengetahuan, tetapi membutuhkan distribusi akses terhadap sumber daya produktif, penguatan kapasitas usaha, dan fasilitasi pasar. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan petani lokal di Kampung Wasur masih bersifat parsial: intervensi pemerintah telah hadir pada aspek pembinaan, tetapi belum sepenuhnya memperkuat kemandirian ekonomi dan posisi petani dalam tata kelola pembangunan lokal.

Keywords:

pemberdayaan;
petani lokal; politik
pembangunan; akses
sumber daya;
Kampung Wasur

¹ CORRESPONDENCE AUTHOR: devotamikan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.1234/jpdi.v2i2.340>

<http://dx.doi.org/10.28991/jspg-20XX-XXXXX>

© Licence Holder of the Journal of Social, Political and Governance, Papsel Reseach Institute. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Pengantar

Pembangunan kampung bukan hanya persoalan penyediaan infrastruktur atau peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya pembangunan, siapa yang terlibat dalam menentukan kebutuhan, dan sejauh mana kebijakan pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengelola kehidupannya sendiri. Dalam konteks tersebut, pemberdayaan memiliki dimensi politik karena berkaitan dengan distribusi daya, akses, kemampuan mengambil keputusan, serta posisi masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah. Pemberdayaan, dengan demikian, tidak cukup dimaknai sebagai pemberian bantuan, tetapi sebagai proses memperkuat kapasitas masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengakses sumber produktif, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menentukan pilihan yang memengaruhi kehidupannya.

Gagasan tersebut sejalan dengan pengertian pemberdayaan sebagai proses pemberian daya atau kekuasaan kepada kelompok yang berada pada posisi lemah sehingga tercipta keseimbangan dalam relasi sosial (Anwas, 2013). Ife (1995) menempatkan pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan kekuasaan kelompok yang kurang beruntung, sedangkan Suharto (2005) menegaskan bahwa keberdayaan berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber-sumber produktif, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang memengaruhi masyarakat. Dengan pengertian ini, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan pemerintah, melainkan dari perubahan kemampuan masyarakat dalam menguasai sumber daya, memanfaatkan peluang ekonomi, dan mengambil bagian dalam proses pembangunan.

Konstruksi kebijakan desa di Indonesia juga memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk menjadi subjek pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa dan kampung sebagai arena penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Dalam konteks ini, pemerintah kampung memiliki posisi strategis karena menjadi institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah yang lebih tinggi dengan kebutuhan warga. Kedekatan tersebut seharusnya memungkinkan kebijakan pemberdayaan disusun berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya lokal.

Pemberdayaan masyarakat lokal juga berkaitan erat dengan partisipasi. Adisasmita (2006) memandang partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Lebih jauh, Suparjan dan Suyatna (2003) menempatkan partisipasi sebagai kekuatan kontrol atas kebijakan pemerintah agar pembangunan tidak justru meminggirkan ekonomi masyarakat lokal. Karena itu, pemberdayaan yang berorientasi pada masyarakat perlu menciptakan ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan, memperoleh dukungan yang relevan, dan mengembangkan kapasitas ekonomi berdasarkan potensi lokal.

Kampung Wasur merupakan salah satu kampung di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Berdasarkan data penelitian, kampung ini telah berkembang sebagai wilayah pemukiman

lokal sejak 1966 dan sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian berburu dan berkebun. Aktivitas pertanian dan perkebunan menjadi bagian penting dari ekonomi rumah tangga lokal. Kondisi tersebut menjadikan petani lokal sebagai aktor penting dalam pembangunan kampung karena keberlanjutan ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan pangan berkaitan langsung dengan kemampuan mereka mengelola sumber daya pertanian.

Pada saat yang sama, penelitian awal menunjukkan adanya keterbatasan dalam kapasitas ekonomi petani. Hasil pertanian sebagian masih digunakan untuk konsumsi keluarga, pengetahuan teknis pertanian relatif terbatas, dan cara bertani masih banyak dilakukan secara tradisional. Pemerintah telah menjalankan sejumlah program seperti pembentukan kelompok, pemberian bantuan, penyuluhan, serta pelatihan pertanian. Namun, penelitian juga mencatat bahwa tidak seluruh bantuan terkelola secara optimal dan tidak semua masyarakat memperoleh dukungan yang sama. Keadaan ini menunjukkan adanya jarak antara keberadaan program pemberdayaan dan kemampuan program tersebut menghasilkan kemandirian petani.

Masalah tersebut penting dibaca sebagai persoalan politik pembangunan lokal. Ketika pelatihan telah tersedia tetapi peralatan, modal, bibit, pupuk, teknologi, dan dukungan pasar masih terbatas, maka pemberdayaan berisiko berhenti pada peningkatan pengetahuan tanpa perubahan kapasitas produksi dan posisi ekonomi petani. Subejo dan Supriyanto (2004) menekankan bahwa pemberdayaan seharusnya memfasilitasi masyarakat lokal untuk merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya melalui tindakan kolektif dan jejaring sehingga terbentuk kemandirian ekonomi, sosial, dan ekologis. Karena itu, akses terhadap sumber daya produktif dan pasar merupakan bagian penting dari proses pemberdayaan, bukan unsur tambahan setelah pelatihan selesai.

Data lapangan memperlihatkan dua persoalan yang menonjol. Pertama, pelatihan dan pembinaan telah dilakukan oleh petugas pertanian bekerja sama dengan pemerintah kampung, tetapi pemanfaatan pengetahuan belum merata dan sebagian petani masih menghadapi keterbatasan alat kerja, modal, bibit, serta pupuk. Kedua, penataan jenis usaha dan hasil pertanian belum menjadi perhatian yang memadai. Sebagian masyarakat menjual hasil pertanian di depan rumah, sementara sebagian lainnya hanya menggunakan hasil tersebut untuk konsumsi keluarga. Kondisi ini membatasi kemampuan petani untuk mengubah kegiatan produksi menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

Atas dasar itu, penelitian ini tidak hanya menanyakan apakah program pemberdayaan telah dilakukan, tetapi bagaimana intervensi pemerintah bekerja dalam memperkuat kapasitas dan akses ekonomi petani lokal. Fokus ini penting karena pemberdayaan dapat bersifat administratif dan programatik ketika hanya ditandai oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi dapat menjadi substantif ketika masyarakat memperoleh daya untuk mengakses sumber produktif, mengembangkan usaha, berpartisipasi, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Perbedaan tersebut menjadi kunci untuk memahami kualitas pemberdayaan di tingkat kampung.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan masyarakat petani lokal di Kampung Wasur dengan memberi perhatian pada pelatihan, pembinaan, penataan jenis usaha, serta

hambatan akses terhadap sumber daya produktif. Secara akademik, penelitian berupaya memperkuat pembacaan pemberdayaan sebagai proses politik pembangunan yang mempertemukan peran pemerintah, kapasitas masyarakat, distribusi sumber daya, dan akses ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki desain pemberdayaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan petani lokal dan lebih mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat kampung.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Desain tersebut digunakan untuk memahami secara mendalam praktik pemberdayaan petani lokal dalam konteks sosial dan pemerintahan Kampung Wasur. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian menangkap pengalaman, penilaian, serta kebutuhan aktor yang terlibat dalam program pemberdayaan, terutama pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan petani lokal. Penelitian dilaksanakan di Kampung Wasur, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke pada Maret sampai Mei 2018.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan pengamatan terhadap aktivitas petani lokal. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, serta bahan tertulis yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat petani lokal. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap masalah penelitian. Sebanyak 14 informan terlibat, terdiri atas seorang Kepala Kampung, seorang aparat kampung, seorang tokoh pemuda, seorang tokoh adat, dan sepuluh masyarakat petani lokal. Komposisi tersebut digunakan untuk memperoleh penjelasan dari sisi pemerintah maupun masyarakat sebagai penerima dan pelaku program pemberdayaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada kondisi aktivitas pertanian, pemanfaatan sarana, serta praktik penjualan hasil pertanian. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman informan mengenai pelatihan, pembinaan, bantuan sarana produksi, modal, bibit, dan penataan usaha. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi lapangan dengan catatan dan bahan tertulis yang relevan. Fokus analisis diarahkan pada tiga aspek yang muncul dalam kerangka penelitian, yaitu pelatihan, pembinaan, dan penataan jenis usaha. Dalam data hasil penelitian, pelatihan dan pembinaan memiliki materi temuan yang saling beririsan sehingga keduanya dianalisis secara berhubungan, tanpa menghilangkan perbedaan fungsinya sebagai penguatan pengetahuan dan pendampingan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara dan observasi diseleksi dan dikelompokkan menurut tema pemberdayaan. Selanjutnya data disajikan secara naratif dengan membandingkan keterangan antaraktor untuk menemukan pola kesamaan maupun perbedaan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara program yang diberikan pemerintah, tingkat pemanfaatannya oleh petani, dan hambatan yang dihadapi dalam produksi maupun pemasaran. Validitas interpretasi diperkuat melalui perbandingan keterangan pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan petani lokal serta dengan data hasil observasi dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konteks Pemberdayaan Petani Lokal di Kampung Wasur

Kampung Wasur merupakan kampung lokal di Distrik Merauke yang terdiri atas beberapa dusun serta memiliki struktur sosial yang melibatkan pemerintah kampung, RT/RW, tokoh agama, dan tokoh adat. Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada kegiatan berburu dan berkebun. Dalam konteks tersebut, kegiatan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Pemerintah kabupaten melalui petugas penyuluh pertanian dan pemerintah kampung telah hadir dalam proses pemberdayaan. Intervensi yang paling nyata berbentuk sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan mengenai cara bertani. Akan tetapi, kehadiran program belum sepenuhnya diikuti oleh dukungan material dan ekonomi yang memadai. Temuan lapangan memperlihatkan kebutuhan terhadap alat kerja, bibit, pupuk, modal, dan teknologi pertanian, serta dukungan untuk menghubungkan hasil produksi dengan pasar.

3.2. Pelatihan dan Pembinaan: Program Hadir, Pemanfaatan Belum Merata

Pelatihan dan pembinaan menjadi bentuk utama intervensi pemerintah terhadap petani lokal. Kepala Kampung Wasur menjelaskan bahwa kegiatan tersebut pernah dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) bersama perangkat kampung. Namun, ia juga menilai bahwa tidak seluruh masyarakat memanfaatkan pengetahuan yang diberikan dan bantuan peralatan belum menjangkau semua warga.

"Pelatihan dan pembinaan memang sudah ada, tetapi tidak semua masyarakat memanfaatkan ilmu yang mereka dapat dari petugas PPL... sedangkan untuk bantuan peralatan petani sementara ini belum semua masyarakat yang mendapatkannya." (Wawancara TWG, 3 Mei 2018)

Keterangan tokoh adat memperkuat pola tersebut. Pelatihan dinilai telah tersedia, tetapi sebagian masyarakat belum mampu mempraktikkan pengetahuan karena akses terhadap peralatan masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas pengetahuan dan kapasitas produksi tidak selalu berkembang secara bersamaan.

"Pelatihan dan pembinaan ini memang sudah ada, tetapi masyarakat tidak memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh PPL... sebagian warga tidak mendapatkan peralatan, padahal peralatan sangat penting dalam bertani." (Wawancara WSG, 4 Mei 2018)

Petani lokal juga menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan hampir setiap tahun dilakukan, tetapi keterbatasan modal dan sarana kerja membatasi kemampuan mereka menerapkan pengetahuan tersebut. Dalam satu keterangan, informan menyebut bahwa terdapat bantuan alat, tetapi distribusinya tidak mencakup seluruh warga dan alat yang diterima tidak selalu dimanfaatkan secara baik. Informan lain menekankan bahwa kekurangan modal untuk membeli peralatan menjadi penghambat partisipasi dalam kegiatan pertanian.

"Pelatihan dan pembinaan ini hampir setiap tahun dilakukan... cuma masyarakat kurang minat karena ada beberapa masyarakat yang tidak punya modal untuk membeli alat-alat kerja petani." (Wawancara NM, 9 Mei 2018)

Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa pelatihan dan pembinaan telah membentuk saluran hubungan antara pemerintah dan petani lokal, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh dua sisi. Dari sisi pemerintah, dukungan sarana dan sumber daya produktif belum merata. Dari sisi masyarakat, pemanfaatan pengetahuan dan bantuan belum konsisten. Karena itu, keberadaan pelatihan tidak secara otomatis menghasilkan kemandirian jika tidak diikuti oleh kemampuan mengakses faktor produksi dan pendampingan yang berkelanjutan.

3.3. Akses terhadap Sumber Daya Produktif

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kendala pemberdayaan tidak berhenti pada keterampilan. Petani menyebut kebutuhan terhadap peralatan kerja, pembibitan, pupuk, modal usaha, dan teknologi pertanian. Kekurangan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat memperluas produksi dan mengubah kegiatan bertani dari sekadar pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Dalam hubungan pemerintah-masyarakat, akses terhadap sumber daya produktif menjadi persoalan penting karena bantuan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat memperkuat kapasitas ekonomi warga. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan peralatan belum diterima secara merata. Penelitian tidak memberikan data kuantitatif mengenai proporsi penerima bantuan, sehingga temuan ini tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya diskriminasi atau keberpihakan tertentu. Yang dapat ditegaskan adalah bahwa terdapat ketimpangan pengalaman akses di antara informan: sebagian mengetahui adanya bantuan, sementara sebagian lain menyatakan belum memperoleh dukungan yang dibutuhkan.

Kondisi ini menciptakan jarak antara kapasitas yang dibangun melalui pelatihan dengan kemampuan aktual untuk menerapkannya. Petani dapat mengetahui cara bertani yang lebih baik, tetapi tanpa alat, bibit, pupuk, modal, dan dukungan teknologi, pengetahuan tersebut tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi peningkatan produksi. Dengan demikian, akses sumber daya menjadi salah satu titik kritis dalam keberhasilan pemberdayaan.

3.4. Penataan Jenis Usaha dan Keterbatasan Akses Pasar

Dimensi kedua yang kuat dalam hasil penelitian adalah penataan jenis usaha dan penjualan hasil pertanian. Sosialisasi pemerintah lebih banyak berfokus pada cara bertani, sedangkan dukungan mengenai penataan tempat usaha, penyajian barang dagangan, dan strategi menarik konsumen belum ditemukan dalam pengalaman informan. Kepala kampung menyebut bahwa sebagian masyarakat menjual hasil pertanian di depan rumah dan sebagian hasil hanya dikonsumsi oleh keluarga.

"Sosialisasi sudah ada hampir setiap tahun... tetapi untuk bagaimana cara menata tempat usaha maupun menata barang dagang untuk menarik konsumen belum ada. Yang sering dilakukan yaitu cara bertani saja." (Wawancara TWG, 3 Mei 2018)

Keterangan petani menunjukkan pola yang sama. Sosialisasi mengenai budidaya telah dikenal, tetapi pengetahuan mengenai pengelolaan tempat usaha dan penataan hasil dagangan belum menjadi bagian yang kuat dari program. Selain itu, petani masih menghadapi keterbatasan bibit, peralatan, pupuk, dan modal. Akibatnya, fungsi

pemberdayaan lebih banyak berhenti pada sisi produksi dan belum terhubung secara utuh dengan tata niaga hasil pertanian.

“Sosialisasi memang sudah ada tetapi hanya tentang cara bertani saja; untuk menata tempat usaha maupun menata barang dagangan agar menarik konsumen belum ada.” (Wawancara EM, 12 Mei 2018)

Temuan ini penting karena kemampuan menghasilkan produk pertanian tidak identik dengan kemampuan memperoleh pendapatan. Petani memerlukan akses terhadap ruang pemasaran, informasi konsumen, tata letak dan penyajian barang, serta jaringan yang menghubungkan produk dengan pembeli. Ketika unsur tersebut tidak tersedia, hasil produksi cenderung tetap beredar dalam skala rumah tangga dan lingkungan terdekat.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Pemberdayaan Petani Lokal

Dimensi	Temuan Utama	Implikasi Tata Kelola
Pelatihan	Pelatihan pertanian dilakukan melalui PPL dan pemerintah kampung; pemanfaatan pengetahuan belum konsisten.	Program kapasitas perlu diikuti pendampingan dan dukungan penerapan.
Pembinaan	Pembinaan telah berlangsung, tetapi alat, modal, bibit, pupuk, dan teknologi belum memadai/merata.	Akses sumber daya produktif menentukan kemampuan petani mengubah pengetahuan menjadi produksi.
Penataan jenis usaha	Belum ada dukungan kuat untuk penataan tempat usaha dan barang dagangan; penjualan masih banyak di depan rumah.	Pemberdayaan perlu menghubungkan produksi dengan akses pasar dan penguatan usaha.

4. PEMBAHASAN

4.1. Pemberdayaan sebagai Distribusi Daya dan Akses

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan pemberdayaan petani lokal di Kampung Wasur tidak dapat dijelaskan hanya melalui ada atau tidak adanya program. Pelatihan dan pembinaan telah berlangsung, tetapi hasilnya belum sepenuhnya mengubah kemampuan ekonomi petani. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan daya atau power, bukan semata dengan kegiatan penyuluhan. Anwas (2013) memaknai pemberdayaan sebagai proses pemberian daya kepada kelompok yang lebih lemah, sementara Ife (1995) menekankan peningkatan kekuasaan kelompok yang kurang beruntung. Daya tersebut dalam konteks petani lokal dapat dibaca sebagai kemampuan mengakses alat produksi, modal, bibit, pupuk, teknologi, pengetahuan, dan pasar.

Dengan demikian, keberadaan pelatihan merupakan satu bagian dari pemberdayaan, tetapi bukan hasil akhir. Ketika petani memperoleh pengetahuan namun tidak memiliki instrumen untuk menerapkannya, terjadi pemisahan antara capacity building dan access building. Temuan Kampung Wasur memperlihatkan bahwa kedua unsur tersebut belum berjalan seimbang. Program telah memperkuat sebagian aspek pengetahuan, tetapi akses terhadap sumber produktif dan fasilitas usaha masih menjadi hambatan. Dalam kerangka Suharto (2005), kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menjangkau sumber-sumber produktif perlu ditempatkan setara pentingnya dengan peningkatan pengetahuan.

Politik pemberdayaan dalam konteks ini terletak pada bagaimana sumber daya pembangunan dialokasikan dan diakses. Penelitian tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya praktik diskriminatif atau penyalahgunaan distribusi bantuan. Namun, pengalaman informan menunjukkan bahwa akses belum merata. Secara analitis, hal ini menegaskan bahwa kebijakan pemberdayaan harus dinilai tidak hanya dari jumlah kegiatan atau bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari jangkauan penerima, kesesuaian bantuan dengan kebutuhan, dan kemampuan bantuan tersebut meningkatkan kemandirian.

4.2. Keterbatasan Model Pemberdayaan yang Berpusat pada Pelatihan

Pola pemberdayaan yang ditemukan cenderung menempatkan pelatihan dan pembinaan sebagai instrumen utama. Model ini penting karena petani membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru. Namun, data menunjukkan bahwa transfer pengetahuan tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku produksi. Sebagian masyarakat tidak memanfaatkan pelatihan secara optimal, sementara sebagian lainnya tidak mempunyai modal atau peralatan untuk menerapkan materi yang diterima. Karena itu, kelemahan pemberdayaan tidak dapat semata-mata diletakkan pada masyarakat yang dianggap kurang berminat; desain kebijakan juga perlu memastikan tersedianya kondisi yang memungkinkan pengetahuan dapat dipraktikkan.

Subejo dan Supriyanto (2004) menekankan bahwa pemberdayaan seharusnya memfasilitasi masyarakat untuk merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal. Pengertian tersebut menempatkan masyarakat sebagai pelaku, bukan hanya penerima pengetahuan. Dari temuan Kampung Wasur, program akan lebih substantif apabila pelatihan dihubungkan dengan pemetaan kebutuhan petani, dukungan sarana produksi, pendampingan setelah pelatihan, dan mekanisme evaluasi yang melihat apakah pengetahuan benar-benar diterapkan. Dengan cara ini, pembinaan dapat bergerak dari aktivitas periodik menuju proses penguatan kapasitas yang berkelanjutan.

Temuan mengenai alat bantuan yang tidak selalu digunakan juga menunjukkan pentingnya kesesuaian antara intervensi dengan kebutuhan dan kesiapan pengguna. Bantuan fisik tanpa pendampingan dapat menghasilkan aset yang tidak produktif, sedangkan pelatihan tanpa alat dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak terimplementasi. Pemberdayaan yang efektif membutuhkan integrasi antara kapasitas manusia, sumber daya material, dan tata kelola pendampingan.

4.3. Penataan Usaha sebagai Politik Akses Ekonomi

Keterbatasan penataan jenis usaha memperlihatkan bahwa pemberdayaan pertanian di Kampung Wasur belum sepenuhnya menghubungkan produksi dengan pasar. Petani tidak hanya membutuhkan kemampuan menanam, tetapi juga kemampuan mengubah hasil

pertanian menjadi komoditas yang dapat memberikan pendapatan. Temuan bahwa penjualan masih banyak dilakukan di depan rumah dan sebagian hasil digunakan untuk konsumsi keluarga menunjukkan skala usaha yang terbatas dan lemahnya akses pemasaran.

Dalam politik pembangunan lokal, pasar bukan sekadar ruang ekonomi yang netral. Kemampuan petani memasuki pasar sangat dipengaruhi oleh akses terhadap informasi, lokasi penjualan, jaringan konsumen, fasilitas, modal, dan dukungan kelembagaan. Karena itu, pemberdayaan ekonomi perlu melampaui produksi menuju penguatan rantai nilai lokal. Pemerintah kampung dan pemerintah kabupaten dapat berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan petani dengan ruang jual, pasar lokal, koperasi, atau bentuk jejaring ekonomi lain yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Penelitian ini tidak menilai model kelembagaan tertentu sebagai pilihan tunggal, tetapi menunjukkan kebutuhan empiris terhadap penguatan akses pasar.

Dari sisi pemberdayaan, penataan usaha juga berkaitan dengan posisi tawar petani. Suparjan dan Suyatna (2003) menekankan pentingnya partisipasi dan kekuatan kontrol agar pembangunan tidak meminggirkan ekonomi masyarakat lokal. Jika petani hanya menjadi produsen dengan akses pasar yang lemah, manfaat ekonomi dari kegiatan pertanian akan terbatas. Sebaliknya, ketika petani memiliki kemampuan mengelola produk, menentukan cara penjualan, dan menjangkau konsumen, posisi mereka dalam ekonomi lokal menjadi lebih kuat.

4.4. Relasi Pemerintah dan Petani: Dari Bantuan Menuju Kemandirian

Pemberdayaan mengandung dilema antara peran pemerintah dan tujuan kemandirian. Petani lokal dalam penelitian masih membutuhkan dukungan peralatan, modal, bibit, pupuk, teknologi, dan pemasaran. Di sisi lain, tujuan akhir pemberdayaan adalah mengurangi ketergantungan dan memperkuat kapasitas masyarakat mengelola sumber daya sendiri. Sulistyani (2004) menempatkan pemberdayaan sebagai proses bertahap menuju kemandirian melalui penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kapasitas intelektual serta keterampilan. Dengan demikian, bantuan pemerintah seharusnya berfungsi sebagai instrumen transisi menuju kemandirian, bukan membentuk ketergantungan permanen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun hubungan melalui PPL dan pemerintah kampung. Relasi ini merupakan modal kelembagaan yang penting karena memungkinkan program mencapai petani. Namun, keberlanjutan pemberdayaan memerlukan mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan. Dukungan dapat dimulai dari identifikasi bersama atas kendala utama, penentuan prioritas sarana, pelatihan yang sesuai dengan komoditas dan kemampuan lokal, pendampingan penggunaan alat, serta fasilitasi penjualan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai fasilitator yang memperkuat kapasitas masyarakat.

Di sisi masyarakat, kemandirian juga membutuhkan kesediaan untuk memanfaatkan pengetahuan dan sarana yang tersedia. Temuan mengenai rendahnya pemanfaatan sebagian pelatihan dan alat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak dapat bersifat satu arah. Masyarakat perlu menjadi aktor yang turut menentukan kebutuhan, mengelola bantuan, dan

mempertanggungjawabkan pemanfaatannya. Hubungan yang demikian akan menggeser pemberdayaan dari pola bantuan menjadi kerja bersama antara pemerintah dan warga.

4.5. Dari Pemberdayaan Programatik menuju Pemberdayaan Substantif

Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan adanya perbedaan antara pemberdayaan programatik dan pemberdayaan substantif. Pemberdayaan programatik terlihat dari hadirnya kegiatan pelatihan, pembinaan, dan sebagian bantuan. Pemberdayaan substantif menuntut hasil yang lebih jauh: petani memiliki kapasitas, akses terhadap sumber produktif, kemampuan memasarkan hasil, dan ruang untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Data Kampung Wasur menunjukkan bahwa aspek pertama telah berjalan, sedangkan aspek kedua masih terbatas.

Perbedaan tersebut penting bagi studi politik dan pembangunan karena keberhasilan program pemerintah tidak dapat hanya diukur dari aktivitas yang terlaksana. Kebijakan yang secara administratif berjalan belum tentu mengubah distribusi kemampuan di tingkat masyarakat. Dalam kasus ini, hambatan pada alat, modal, bibit, pupuk, teknologi, dan penataan usaha membatasi daya transformasi program. Karena itu, pemberdayaan perlu diarahkan pada integrasi antara pelatihan, akses sumber daya produktif, pendampingan, partisipasi masyarakat, dan penguatan pasar lokal.

Pembacaan tersebut juga menghindari dua penyederhanaan. Pertama, kegagalan pemberdayaan tidak tepat jika seluruhnya dibebankan kepada pemerintah karena data juga menunjukkan adanya masalah pemanfaatan pengetahuan dan alat oleh sebagian masyarakat. Kedua, kegagalan tidak tepat jika seluruhnya dibebankan kepada masyarakat karena petani menghadapi keterbatasan material yang nyata. Temuan justru menunjukkan hubungan timbal balik antara kapasitas kebijakan dan kapasitas masyarakat. Politik pemberdayaan yang lebih efektif membutuhkan tanggung jawab bersama, tetapi dengan pemerintah tetap memegang peran penting dalam menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan fasilitas pembangunan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan petani lokal di Kampung Wasur telah dijalankan melalui pelatihan dan pembinaan yang melibatkan pemerintah kabupaten, petugas penyuluh, dan pemerintah kampung, tetapi hasilnya belum optimal. Program telah menyediakan ruang peningkatan pengetahuan tentang pertanian, namun belum sepenuhnya diikuti oleh akses yang memadai terhadap peralatan kerja, modal usaha, bibit, pupuk, dan teknologi. Di sisi lain, sebagian pengetahuan dan bantuan yang tersedia juga belum dimanfaatkan secara konsisten oleh masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan tidak dapat hanya bergantung pada transfer pengetahuan atau pemberian bantuan secara terpisah.

Pada aspek ekonomi, penataan jenis usaha dan akses pasar menjadi kelemahan utama. Sosialisasi lebih banyak berorientasi pada cara bertani, sedangkan dukungan untuk menata tempat usaha, menyajikan hasil pertanian, dan memperluas hubungan dengan konsumen belum berkembang secara memadai. Akibatnya, sebagian petani masih menjual hasil di depan rumah atau menggunakannya untuk konsumsi keluarga. Temuan ini menegaskan

bahwa politik pemberdayaan petani lokal berkaitan dengan distribusi akses terhadap sumber daya produktif dan kesempatan ekonomi.

Pemberdayaan di Kampung Wasur karena itu perlu bergerak dari pendekatan programatik menuju pemberdayaan substantif. Pemerintah perlu mengintegrasikan pelatihan dan pembinaan dengan dukungan sarana produksi, pendampingan pemanfaatan bantuan, penguatan kapasitas usaha, serta fasilitasi akses pasar. Pada saat yang sama, masyarakat perlu dilibatkan secara lebih aktif dalam menentukan kebutuhan dan mengelola sumber daya yang diberikan. Integrasi antara kapasitas pemerintah dan kemandirian masyarakat menjadi syarat penting agar pemberdayaan tidak berhenti sebagai kegiatan rutin, tetapi benar-benar memperkuat posisi petani lokal dalam pembangunan kampung.

5. Referensi

- [1.] Adisasmita, R. (2006). Pembangunan pedesaan dan perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [2.] Anwas, O. M. (2013). Pemberdayaan masyarakat di era global. Bandung: Alfabeta.
- [3.] Hikmat, H. (2010). Strategi pemberdayaan masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- [4.] Ife, J. (1995). Community development: Creating community alternatives—Vision, analysis and practice. Australia: Longman.
- [5.] Kartasasmita, G. (1995). Pemberdayaan masyarakat: Sebuah tinjauan administrasi. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Brawijaya, Malang.
- [6.] McArdle, J. (1989). Community development tools of trade. Community Quarterly Journal, 16, 47–54.
- [7.] Moleong, L. J. (2000). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [8.] Mubyarto. (1996). Pengembangan kawasan terpadu sebagai program penanggulangan kemiskinan.
- [9.] Parsons, R. J., et al. (1994). The integration of social work practice. California.
- [10.] Rappaport, J. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue. Prevention in Human Services.
- [11.] Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [12.] Subejo, & Supriyanto. (2004). Metodologi pendekatan pemberdayaan masyarakat. Short paper Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Fakultas Pertanian UGM, 16 Mei 2004.
- [13.] Suharto, E. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- [14.] Sulistyani, A. T. (2004). Kemitraan dan model-model pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [15.] Sumodiningrat, G. (1998). Membangun perekonomian rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [16.] Suparjan, & Suyatna, H. (2003). Pengembangan masyarakat: Dari pembangunan sampai pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.